BAB III
STRUKTUR SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT GORONTALO

Arsitektur Tradisional merupakan penjelmaan dan pencerimnan dari sosiokultural jamannya. Oleh karena itu banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya Arsitektur Tradisional, seperti keadaan alam lingkungan, kebudayaan, sistem kekerabatan, sistem religi, adat istiadat dan pola pemerintahan. Hal tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain sehingga terbentuk aturan-aturan yang kemudian menjadi himpunan pedoman yang digunakan oleh manusia. Adanya pedoman ini menyebabkan teraturnya hubungan antara masyarakat.

3.1 Sejarah Terbentuknya Wilayah Gorontalo

Asal mula terbentuknya wilayah Gorontalo dituturkan dalam beberapa versi, hal yang mana tidak dapat dibenarkan atau disalahkan dan sulit dipastikan karena masing-masing menyatakan bukti kebenaran penuturan tersebut.

Pertama; terjadinya masyarakat Gorontalo diawali dengan terjadinya daratan Gorontalo dimana masyarakat bermukim Menurut penuturan Salahuddin Djafar dalam Daulima (2006) pada zaman purba semua daratan Gorontalo yang ditempati sekarang ini, masih berupa lautan, terdapat suatu kelompok masyarakat yang menamakan diri bangsa *Weda* dan berhulu di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai dataran gunung *Boliyohuto*. Tentang bangsa ini belum diperoleh suatu *over levering* (penuturan) mengenai asal-usulnya, corak kebudayaannya dan lain-lain sebagainya. Salahuddin melanjutkan, dalam buku lontara kerajaan Luwu yang dikarang oleh Lagaligo yang hanya terdapat suatu catatan mengenai suatu

bangsa *to wading* yang berkedudukan di sebelah utara Sulawesi, yang diketahui dari tutur kata (*over levering*) hanyalah semasa dataran Gorontalo ini lambat laun menjadi kering, akibat perkerutan kulit bumi (*upward presure*), bangsa *Weda* tersebut kelompok demi kelompok meninggalkan basis induknya dan memencar di daerah Gorontalo yang kedapatan kering itu. Sebagian ke timur tenggara, sebagian ke barat dan sebagian ke selatan. Proses perpindahan tidak terjadi sekaligus dan setiap yang meninggalkan basis induknya dikepalai oleh pemimpin masing-masing. Menurut penuturan, kelompok yang terpencar adalah 21 kelompok dan dari 21 kelompok itu 17 kelompok yang mempersatukan diri menjadi Kerajaan Kesatuan *Hulonthalo*. Ketujuh belas kelompok tersebut lahir dari perpecahan-perpecahan kelompok asli, sedang empat yang lainnya hilang kedudukannya sebagai kelompok yang berpengaruh (Daulima, 2006:2-4).

Kedua; menurut penuturan Kaluku dalam Daulima (2006). bahwa masyarakat Gorontalo tumbuh bersamaan dengan terjadinya daratan Gorontalo. Semasih wilayah Gorontalo masih berupa lautan, masyarakat asli Gorontalo berada di Bangio/Pinogu pada ketinggian 1902 m. Masyarakat ini mempunyai Raja turun temurun sampai dengan Raja ke XVIII. Dengan adanya pusat kota di Bangio/Pinogu atau Tuwawa maka terjadilah penyebaran penduduk atau suku sepanjang pesisir pegunungan ke sebelah Timur sampai di Bolaang Mongondow, ke sebelah selatan sampai Molibagu, Bolaang Uki dan sekitarnya, ke sebelah barat sampai ke Atinggola dan sekitarnya termasuk Buol Toli-Toli. Sejauh penyelidikan hal ini dapat dibuktikan dengan bahasa yang hampir sama dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Tuwawa, baik bahasa Buol - Atinggola - Kaidipan - Bolaang

Mongondow - Bintauna - Kotabunan, semuanya berbahasa Suwawa termasuk nama-nama tempat banyak persamaannya. Selanjutnya dari Tuwawa kemudian menyebar ke daratan yang baru yaitu kerajaan Limboto, kemudian menyebar lagi ke daratan yang baru yang dikenal dengan nama Gorontalo, lalu menyebar lagi sampai ke kerajaan Bolango dan terakhir ke Kerajaan Atinggola. Jadi jelas semua kerajaan ini bersumber dari satu kerajaan yaitu kerajaan Suwawa (Daulima, 2006:11).

Sebagaimana penuturan Kaluku, Daulima juga menyatakan bahwa masyarakat Gorontalo baik yang berdiam di kotamadya maupun di kabupaten Gorontalo berasal dari satu keturunan yaitu dari Tuwawa atau Bangio atau Pinogu. Karenanya perlu terjalin rasa persatuan dan kesatuan yang terbina baik, sesuai ikrar abad ke XV sebagai berikut:

"Masyarakat yang tahu akan sejarah ini, menghindari fitnah dan pergunjingan, karena hubungan jiwa antara Suwawa-Limboto-Gorontalo begitu erat karena dari asal yang satu"

Hal ini dipertegas oleh orang-orang tua dan diperingatkan dalam *paduma* (Pedoman) sebagai berikut:

"Wonu Lumengge Eluto Suwawa Limutu Palialo"
"Wonu Mopahuto Eluto, Limutu Dehuolo Hulontalo"

Artinya :

"Kalau keris terangkat sedikit dari sarungnya maka yang akan luka Suwawa dan Limboto"

"Kalau keris tercabut, maka Limboto dan Gorontalo akan turut tertimpa"

Ketiga; selanjutnya menurut cerita orang tua di Gorontalo dalam penuturan Daulima (2006), yang disebut daerah kotamadya Gorontalo sekarang adalah bekas kerajaan Gorontalo atau kerajaan *Hulonthalo*. Nama Gorontalo pada mulanya berasal dari kata *Gowa Lontalengo* (orang Gowa yang melancong), kemudian barulah menjadi *Holantalangi*, lalu menjadi *Hulonthalo* dan oleh orang Belanda disebut dengan Gorontalo. Dengan adanya istilah *Gowa Lontalengo* ini oleh orang tua di Gorontalo diceritakan bahwa orang asing yang pertama-tama menginjakkan kakinya ke daerah ini adalah berasal dari kerajaan Gowa. Sesudah itu menyusul pula orang-orang Bugis. Orang-orang Gowa masuk sampai ke pedalaman di lereng bukit Dumbo sekarang, mereka bertemu dengan penduduk asli. Kemudian terjadilah percampuran antara kedua suku ini. Lewat proses asimilasi penduduk itulah yang melahirkan suku Gorontalo sekarang ini. Penduduk Gorontalo inilah yang memberi gelar orang Gowa tersebut dengan *Gowa Lontalengo*. Daulima menambahkan, lama kelamaan orang pegunungan tersebut kian bertambah dan atas inisiatif dari rajanya yang bernama Wadipalapa maka kerajaan Gorontalo meluaskan wilayahnya ke utara yaitu ke Dungingi (sekarang kampung Tuladenggi). Sekitar kedatangan orang-orang Bugis dapat dilihat kenyataan yang ada di daerah ini dimana mereka datang ke Gorontalo menyusuri sungai Bone sekarang hingga ke Huyula. Disanalah mereka membuat suatu perkampungan dan bekas perkampungan itu sekarang bernama Bone ibukota negeri kecamatan Suwawa. Sebagian orang-orang Bugis melancong atau melanjutkan pengembaraannya ke timur hingga ke pesisir, disana mereka

membuat suatu perkampungan pula yang bernama Bonepantai. Di daerah ini pula dapat ditemukan sebuah kampung yang berhadapan letaknya dengan gunung Dumbo, dipinggiran sungai Bone yang disebut Kampung Bugis dimana kepala kampungnya disebut *Matoa* (Daulima, 2006:18).

3.2 Terbentuknya Kelompok Masyarakat Gorontalo

Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Gorontalo, Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa di Tuwawa telah ada pengelompokan manusia yang merupakan penduduk dataran tersebut. Oleh karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka untuk saling menanggulangi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupannya, maka terjalin satu persamaan rasa ingin hidup bersama. Mula-mula mereka terikat dalam satu kelompok yang terdiri dari sepasang suami istri dan anak-anaknya, kemudian anak-anak ini menjadi dewasa membentuk satu keluarga, yang tinggal tak jauh dari induknya, maka terjadilah kelompok masyarakat yang disebut *Lembo'a*.

Lembo'a ini semakin hari semakin bertambah jumlahnya, dan untuk kepentingan saling mencukupi kebutuhan, mereka masing-masing saling membina harga diri mereka, dengan persaingan-persaingan dalam mata pencaharian, pengalaman, dan ilmu-ilmu magis yang didapatkan dari falsafah alam, serta pengobatan-pengobatan terhadap orang yang sakit. Setiap *Lembo'a* ini mereka saling memperguncingkan tentang kekurangan-kekurangan *Lembo'a* yang lain, dan menganggap *Lembo'a* mereka lebih tinggi dari *Lembo'a* yang ada. Terjadilah saling pertikaian antara *Lembo'a*. Sistem yang berlaku adalah siapa yang kuat

dialah yang menang. Mulai terjadi sistem berkuasa antara *Lembo'a* yang kuat dengan *Lembo'a* kalah.

Terasa hal ini sangat merugikan untuk perkembangan dalam menata kehidupan mereka, maka timbullah gagasan untuk membuat persekutuan antara *Lembo'a* - *Lembo'a* itu dibawah satu komando. Terajadilah *Linula*. Pemimpin *Linula* adalah merupakan Kepala Suku, yang harus ditaati oleh masyarakat yang tergabung pada *Linula* tersebut.

Linula yaitu kelompok dari beberapa *Lembo'a* yang telah memiliki satu kesatuan pandangan tentang dunia luar, lebih terbuka dan akrab lahir batin dengan masyarakat lain. Pembentukan *Linula* ini berdasarkan satu kesepakatan dalam sidang musyawarah para pemimpin *Lembo'a* dan memiliki seorang *Olongiya* (Raja) yang dapat diteladani, bersifat melindungi dan penuh rasa tanggungjawab. Dengan adanya *Linula* ini masyarakat lebih banyak maju dalam bidang pertanian peternakan serta dapat mengatur keamanan ketertiban hukum (*Buto'o*) wilayahnya dan sanga taat kepada pemimpinnya. Ukuran wilayah *Linula* sekarang ini adalah Kecamatan (Abdul, 2014:40).

Kepala-kepala *Lembo'a*, tetap berfungsi memimpin *Lembo'a* dan merupakan wakil masyarakat apabila diadakan musyawarah, demikian pula jika menerima perintah dari kepala Suku. Dari *Linula* inilah lahir tatacara kebiasaan seperti gotong royong dalam membuka ladang, sesajen untuk meminta kesuburan tanah, mengadakan tari-tarian magis untuk pengobatan dan lain sebagainya.

Ketika *Linula* ini kedatangan orang-orang asing seperti dari kerajaan *Gowa* dan *Bugis*, yang membawa budayanya sendiri, dan terjadilah proses asimilasi, maka terjadilah persekutuan *Linula* menjadi *Lipu* atau Negeri. Dengan adanya persekutuan yang besar ini maka dengan sendirinya Kepala Suku, telah merubah sistem pemerintahannya menjadi suatu Kerajaan, dan pemimpin Kerajaan disebut *Olongiya* atau Raja. ketika timbul dataran-dataran yang baru, seperti Limboto, maka Sistem Kerajaan ini mulai bertambah sehingga terdapat Raja dibawah untuk Kerajaan-kerajaan kecil, dan Raja diatas untuk Kerajaan-kerajaan yang besar.

Lipu adalah penggabungan dari *Linula* - *Linula* yang di bawah koordinasi seorang raja berdasarkan perjanjian persekutuan dari *Linula* - *Linula* tersebut. Dalam sejarah Gorontalo, ada dua kelompok *Lipu* yang membentuk kerajaan yaitu kerajaan di bagian utara (*Olongiya to Tilayo*) dan kerajaan di bagian selatan (*Olongiya to Huliyaliyo*). Untuk membedakannya dengan raja *Linula* maka raja *lo Lipu* disebut *Olongiya Pulu* atau Maharaja. Penggabungan ini dimulai tahun 500-600 M.

Penggabungan dari beberapa *Linula* ini menjadi *Lipu* disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Keinginan untuk hidup bersama dalam daerah yang luas.
2. Untuk menghilangkan persekutuan antara tiap-tiap *Linula*, yang kadang-kadang kelompok ini mudah memfitnah kelompok yang lain.
3. Keinginan bersatu untuk menghadapi musuh dari luar Kerajaan.

Selanjutnya gabungan dari beberapa Kerajaan menjadi *Pohala'a*. *Pohala'a* adalah penggabungan dari beberapa Kerajaan yang berserikat, bersekutu berdasarkan perjanjian persekutuan, seperti *Limo lo Pohala'a* (Serikat Lima Kerajaan) yaitu Suwawa, Limboto, Gorontalo, Bolango, Atinggola. *Uduluwo Limo lo Pohala'a* yaitu *Pohala'a* Limboto - Gorontalo menjadi satu (dwi tunggal) berdasarkan janji dan sumpah ditambah dengan *Pohala'a* Suwawa, Bolango, dan Atinggola (Abdul, 2014:41).

3.3 Sejarah Perkembangan Limo Pohala'a Di Daerah Gorontalo

Menurut Riedel (1870:76), *Pohala'a* diartikan sebagai *Wala'o* atau anak. Liputo (1943, III:22) menerjemahkan *Pohala'a* dengan kesanakan dengan dasar bahwa *Pohala'a* berasal dari kata *Wala'o*. Kaluku (1965:2) menerjemahkan *Limo lo Pohala'a* dengan lima bersaudara.

Secara etimologis *Pohala'a* adalah wadah persatuan keluarga. Dengan pengertian lain *Pohala'a* merupakan suatu masyarakat hukum dalam suatu Kerajaan atau perserikatan dari Kerajaan - Kerajaan yang diikat oleh tali persaudaraan, adat – istiadat, kepercayaan, hukum adat tata negara dan kemasyarakatan Gorontalo.

Sejalan dengan perkembangan penduduk dari waktu kewaktu maka munculah *Linula – Linula* (Kerajaan kecil) yang sifatnya juga mengelompok. *Linula – Linula* tersebut tersebar dari puncak gunung Ali di sebelah timur Bangio – Suwawa sampai Boneda'a, Mengolato (Lonuo) sampai Boidu (Tapa), Huntu lo Bohu sampai Huntu lo Tiopo (Biyonga), Huidu (Limboto) sampai kaki gunung

Boliohuto, Panipi dan Payunga (Batuda'a) sampai Tohupo (Batuda'a), Padengo (Kabila) sampai Hulawa (Telaga), Pontolo dan Leboto (Kwandang) sampai Atingola, Kaidipan, Bintauna dan Bolaang Uki dan dari Kayu Bulan sampai Tilamuta. Kelompok - kelompok *Linula* yang tersebar pada daerah yang telah disebutkan, kemudian mengelompok ke dalam beberapa *Pohala'a* (Kerajaan yang lebih besar) yakni : (1). *Pohala'a* Suwawa - Bone, (2). *Pohala'a* Limboto, (3). *Pohala'a* Gorontalo, (4). *Pohala'a* Atinggola dan (5). *Pohala'a* Bolango. *Pohala'a* Boalemo dianggap *Pohala'a* bebas (lahi-lahidiya) yang baru menjadi anggota lima *Pohala'a* pada tahun 1870, setelah *Pohala'a* Bulango berakhir (1860). Sedang *Pohala'a* Bintauna, Kaidipan Besar, Bolaang Uki menjadi anggota kelompok *Pohala'a* luar.

3.3.1 Pohala'a Suwawa – Bone

Pada mulanya (abad V) terdapat suatu *Pohala'a* yang besar dari suku Pidodotiya yang kemudian terbagi menjadi 4 (empat) *Linula* yang bermukim antara dataran tinggi Bangio – Sinondoo Pinogu sampai Boneda'a dan Molintogupo di Suwawa. Keempat *Linula* tersebut adalah *Linula* Linggongo, Butage, Motobiu dan Wagewo, yang kemudian berserikat dalam satu kerajaan, yakni kerajaan Tuwawa dengan rajanya yang pertama bernama Ayudugiya I (±500 M). Ayudugiya I diganti oleh puterinya Ige (579) yang kemudian diganti oleh anaknya Mokotambibulawa. Dari sumber buku tua, raja Mokotambibulawa inilah yang dikenal sebagai raja yang pertama karena dialah yang berhasil memperkuat perserikatan *Linula* Linggongo, Butage, Motobiu dan Wagewo (668). Sebagai catatan, nama Mokotambibulawa inilah yang oleh pemuka -

pemuka adat *Pohala'a* Suwawa diputuskan untuk digelarkan pada Bapak Hi. Nani Wartabone (alm) yang kemudian dengan pertimbangan lain diganti dengan Ti Tulutani (Sultan). Selanjutnya berturut - turut raja - raja kerajaan Tuwawa sampai pada raja Mooduto (1320) adalah Raja Tuwawa yang terakhir.

Sebelum perang saudara kerajaan Tuwawa (Mooduto) dengan kerajaan Mongondow (Pulumoduyo), raja Mooduto kawin dengan puteri Rawe yang kemudian dijadikan raja Bone di Bonedaa. Nama kerajaan Bone diambil dari negeri asal puteri Rawe yakni Bone di kerajaan Luwu. Menurut sumber lain Bone diambil dari kata *Bonda* dan *Bunda* sebagai sebutan untuk maharaja puteri Rawe.

Pada masa perang saudara Mooduto - Pulumoduyo. sebagian penduduk *Linula* Butage dan Wagewo berpindah ke Dumoga, Atinggola, Kaidipan, Bolaang Uki. Sedang penduduk *Linula* Linggongo dan Motobiu sebagian mengembara ke sebelah barat Bangio yang kemudian dikenal sebagai suku bangsa Yitohiya atau Witohiya. Suku bangsa ini yang kemudian berkembang dan mendirikan kerajaan Limboto, Gorontalo dan Bolango, yang akan dijelaskan kemudian.

Setelah tewasnya raja Mooduto (istana dan kuburnya masih ada di leda - leda Pinogu Suwawa), maka pemerintahan kerajaan Tuwawa dilanjutkan oleh permaisuri Puteri Rawe di Bonedaa dengan sebutan Kerajaan Bone. Kemudian setelah Puteri Rawe wafat diganti oleh puteranya Luadu II yang memerintah dari tahun 1427 - 1460. Luadu II diganti oleh puteranya Gintulangi (1460) yang kemudian merubah lagi nama Kerajaan Bone menjadi Kerajaan Suwawa.

Menurut buku tua, Raja Gintulangi inilah yang memprakarsai pertemuan pertama Enam *Pohala'a* (1481) untuk mendamaikan perselisihan antara kerajaan Gorontalo (Ntihedu) dengan raja Limboto (Moliyedaa, nenek Ntihedu). Yang hadir pada pertemuan itu ialah Gintulangi (Raja Suwawa), Sendeno (Raja Bintauna), Tumolinggi (Raja Atinggola), Tintingiyo (Raja Bolango), Ntihedu (Raja Gorontalo) dan Moliyedaa (Raja Limboto). Pertemuan itulah yang untuk pertama kalinya melahirkan gagasan *Tuwawu Duluwo Limo lo Pohala'a*. Konsep *Tuwawu* adalah berarti kesatuan, *Duluwo* adalah Suwawa - Limboto. Menurut S.R. Nur, Suwawa - Limboto dikenal sebagai *U Duluwo Mulo*. Sedang *Limo lo Pohala'a* yang pertama adalah :

1. *Pohala'a* Suwawa - Bone, Bone - Suwawa, yang disebut saja Suwawa.
2. *Pohala'a* Limboto - Gorontalo, Gorontalo - Limboto, yang diharapkan dapat bersatu.
3. *Pohala'a* Bintauna
4. *Pohala'a* Atinggola dan
5. *Pohala'a* Bolango.

Karena perselisihan yang terjadi di kerajaan Limboto yang antara lain pembunuhan raja persatuan (Ta Lobalanga) yakni Raja Polamolo dan peristiwa pengangkatan Raja Pilohibuta dan bukannya Raja Datau (Datau ditampung oleh Ntihedu Raja Gorontalo) maka perdamaian antara kerajaan Limboto dan kerajaan Gorontalo tidak berlanjut. Selanjutnya secara berturut-turut raja - raja kerajaan Suwawa sampai tahun 1883 (masuknya pengaruh Belanda).

3.3.2 Pohala'a Limboto

Pohala'a Limboto adalah perserikatan dari *Linula* - *Linula* (kerajaan - kerajaan kecil) yakni :

1. *Linula* Lumehedaa dengan *Olongiya* (Raja) Maimuna. Kerajaan ini mewilayahi daerah perbukitan yang berpusat di desa Pone sekarang.
2. *Linula* Dunggala dengan *Olongiya* (Raja) Yilobua, dengan wilayah kerajaan Batudaa yang berpusat di Panipi sekarang
3. *Linula* Hungayo, dengan *Olongiya* (Raja) Wonggodu, dengan wilayah kerajaan pegunungan Balahu dan berpusat di Huntu lo tiopo desa Biyonga sekarang.
4. *Linula* Tomilito, dengan Raja Hemuto yang mendiami daerah perbukitan di Isimu.
5. *Linula* Dunito, dengan Raja Talango yang diduga berpusat di Talumelito sekarang.

Dari ke lima *Linula* (Kerajaan) yang dikemukakan, *Linula* Lumehedaa dengan Raja Maimuna yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kerajaan - kerajaan lainnya. pada mulanya perserikatan *Linula* hanya terdiri dari *Linula* Lumehedaa, Dunggala dan Hungayo. berkat upaya Raja Maimuna akhirnya *Linula* Tomilito dan Dunito dapat dimasukkan dalam ikatan perserikatan Lima *Linula* yang kemudian berkembang menjadi *Pohala'a* besar yakni *Pohala'a* Limboto. Limboto berasal dari kata *"Limutu"* yang berasal dari kata *"Limo Loputu"* (lima suku bangsa yang telah menjadi satu). Yang diangkat menjadi Raja

dari kerajaan persatuan Limboto yang pertama adalah Raja Maimuna yang tetap merangkap Raja Lumehedaa. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan berada pada *Linula - Linula*, dimana setiap keputusan harus dimusyawarahkan bersama dengan raja-raja *Linula* dalam suatu Dewan atau Majelis Kerajaan.

Setelah Maimuna meninggal kedudukan Raja diganti oleh Mbu'i Bungale. Menurut buku lain yang dikemukakan oleh Liputo (1943, IV:29), Mbu'i Bungale adalah saudara tua (kakak) Humolangi (Raja Padengo - Gorontalo), keduanya adalah anak dari Damapolii dengan Yonuluhulu putera Datu Binangka Raja Mongondow, merekalah yang menjadi datuk dari Raja Limboto dan Raja Gorontalo. Mbu'i Bungale berjasa dalam memperluas kerajaan Limboto antara lain dengan *Linula* Bulila Timbu'u, Loloato, Yipilo dan lain-lain (Liputo, 1943 IV:21). Mbu'i Bungale digantikan oleh puterinya Tolangohula yang dianggap oleh anggota-anggota Linula sebagai Maharaja pemersatu kerajaan Limboto. Maharaja Ratu Tolangohula dinobatkan pada tahun 1330 dalam suatu sidang Dewan Kerajaan oleh Raja Hungayodaa (Wonggodu).

Maharaja Ratu Tolangohula dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Limboto dibantu oleh *Hu Hu Hu*, jabatan yang dirangkap oleh raja - raja Lumehedaa (turunan dari nenenda Maimuna). *Hu Hu Hu* dibantu oleh empat orang *Wuleya lo Lipu* yang tetap menggunakan gelar *Olongiya*. Raja-raja dari suku - suku bangsa yang kecil - kecil mendapat gelar *Ta'uda'a*. Empat *Linula* pembantu *Hu Hu Hu* kemudian menjadi 8 *Linula* yang dibagi dua menjadi empat-empa *Linula* dengan kedudukan sebagai berikut : *Linula* Hungayo, Dunito, Botu dan Yipilo, menjadi *Buleme Olowala* (Bintara Kanan) dengan pembagian

Hungayo dan Dunito sebagai petugas kepolisian (keamanan). Sedang Botu dan Yipilo bertugas dalam pelaksanaan adat - istiadat. *Linula* Tunggulo (Huntu lo Tiopo), Loloato, Timbuu dan Lupoyo menjadi *Buleme Oloyihi* (Bintara kiri) dengan tugas : Berhak mengangkat dan memecat Sri Baginda Maharaja dan Menjalankan adat istiadat secara seksama. Selanjutnya raja - raja Limboto secara berturut - turut sampai Raja yang terakhir Iskandar Olii pada tahun 1841 (Botutihe & Daulima, 2007:19-23).

3.3.3 Pohala'a Gorontalo

Menurut cerita klasik bahwa Kerajaan tertua di Gorontalo adalah kerajaan Wada yang berpusat di gunung Buliohuto dengan Raja pertama Bumiaguguto (Burung Elang). Tacco menyebutkan Kerajaan Wada atau Bada (Kaluku, 1968:1), Andi Iskandar menyebut Wadeng (1957:28), Liputo menyebutnya Wadeng atau Wadong (1943, III:29). Menurut S.R. Nur (1979:15), 65% responden penelitiannya menyatakan bahwa Kerajaan Wada tersebut terletak di Suwawa dan bukan di Buliohuto. Sedang menurut Liputo (IV:33) kerajaan Wada adalah kerajaan Padengo (Rajanya Humolangi kawin dengan Rawe) dan berpusat di Panggulo dan masuk salah satu *Linula* dalam lingkungan kerajaan Gorontalo. Dalam hal ini kalau menurut buku Lagaligo disebutkan bahwa Ilahudu atau Wadipalapa adalah pelindung negeri Wada, maka penuturan Liputo lebih logis untuk dapat diterima.

Kerajaan Gorontalo adalah himpunan atau perserikatan dari 17 *Linula* (Riedel dalam Richard Tacco, 1956:10). Ke 17 *Linula* (Kerajaan - kerajaan kecil) tersebut yakni :

1. *Linula* Hunginaa, dengan Raja Lihawa
2. *Linula* Lupoyo, dengan Raja Pai
3. *Linula* Bilinggata, dengan Raja Loa
4. *Linula* Wuwabu, dengan Raja Wahimulungo
5. *Linula* Biawu, dengan Raja Wolangohuladu
6. *Linula* Padengo, dengan Raja Palanggi
7. *Linula* Huangobotu Olowala, dengan Raja Dawanggi
8. *Linula* Tapa, dengan Raja Deilohiyodaa
9. *Linula* Lauwonu, dengan Raja Bongohulawa
10. *Linula* Toto, dengan Raja Tilopalani
11. *Linula* Dumati, dengan Raja Buata
12. *Linula* llotedea, dengan Raja Tamaga
13. *Linula* Pantungo, dengan Raja Ngobuto
14. *Linula* Panggulo, dengan Raja Hungiyalo
15. *Linula* Huangobotu Oloyihi, dengan Raja Lealini
16. *Linula* Tamboo, dengan Raja Dayilombuto
17. *Linula* Hulontalangi, dengan Raja Wadipalapa.

Sebelum terbentuknya perserikatan dari 17 *Linula* tersebut, *Linula* (Kerajaan) yang dianggap berpengaruh adalah Kerajaan Padengo dengan Rajanya Humolangi. Humolangi dikenal sebagai Raja yang selalu *Molontalengo* atau

Meleleyangi (Bepergian) mengunjungi *Linula* - *Linula* lain dan selalu memberi nasihat akan pentingnya persatuan dan kerukunan antara *Linula*. sikap persatuan yang selalu diupayakan oleh Humolangi dalam lingkungan kehidupan *Linula* di Gorontalo adalah diilhami oleh tragedi perang saudara antara Mooduto Raja Suwawa dengan Pulumoduyo Raja Mongondow, yang telah membawa kesengsaraan bagi rakyat banyak. Untuk diketahui bahwa ibu Raja Humolangi adalah Bulaidaa yakni adik Raja Mooduto Setelah Humolangi meninggal digantikan oleh puteranya Ilahudu (Wadipalapa) yang memiliki sifat-sifat pendamai dan pemersatu sebagaimana ayahnya Humolangi.

Raja Ilahudu yang kemudian terkenal dengan nama Iskandar Wadipalapa berhasil mempersatukan ke 17 Kerajaan dalam wadah kesatuan Kerajaan Gorontalo (sama dengan Tolangohula di Limboto). Pada mulanya pusat Kerajaan berada di Kampung Hulawa (dataran tinggi desa Bendungan sekarang) yang kemudian pindah ke Dungingi dan yang terakhir pindah ke Hunto (sekitar km 1 di Kotamadya sekarang).

Dalam melaksanakan pemerintahan Kerajaan, Ilahudu membagi 17 Kerajaan atas 3 (tiga) golongan yakni :

1. Golongan *"Dile"* atau golongan Suami - isteri
2. Golongan *"Tilo-Tiyamo"* atau golongan Ibu - Bapak
3. Golongan *"Tiyombu"* atau golongan Kakek - Nenek

Golongan *Dile* (Hunginaa, Lupoyo, Wuwabu dan Bilinggata) mempunyai kedudukan yang sama dengan Raja, yang juga disebut *Hulanggili Hulalata* (Pembantu Raja) dan *Wolihi Pato'o Data* (Tiang Negara).

Tugas golongan *Dile*, antara lain :

1. Hunginaa, bertugas dalam urusan pembinaan kepercayaan.
2. Lupoyo, bertugas dalam urusan tata usaha istana dan menjadi Kepala Pemerintahan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan serta menyelidiki pelaksanaannya.
3. Wuwabu, melaksanakan pengawasan atas wu'udu dan bubalata. Mengajukan tuntutan terhadap yang melanggar adat istiadat walau Raja sekalipun
4. Balinggata, bertugas di bidang ketertiban keamanan kerajaan dan sebagai panglima perang.

Golongan *Tilo - Tiyamo* (Ibu - Bapak), yang terdiri dari Raja Biawu, Padengo, Huangobotu Olowala, Lauwonu. Dumati dan Ilotidea : bertugas menjaga *Butu* atau sumber - sumber kehidupan rakyat. Mereka juga membuat adat istiadat serta tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Golongan *Tiyombu* (kakek - nenek), juga terdiri dari enam Raja yakni Raja Tapa, Pantungo, Toto, Panggulo, Huangobotu Oloyihi dan Tamboo. Golongan ini bertugas menjaga pelaksanaan adat istiadat dan berhak mengusulkan pemecatan Raja. Sebagai contoh pemecatan Raja Bulalonawa oleh Baate lo Panggulo.

Dengan sistem pemerintahan yang telah dicanangkan Ilahudu, Kerajaan Gorontalo berkembang menjadi Kerajaan besar dan kuat sampai pertengahan abad XIX dengan Raja terakhir Zainal Abidin Monoarfa pada tahun 1859.

3.3.4 Pohala'a Atinggola

Suku bangsa Atinggola berasal dari bagian kelompok suku Pidodotiya di Bangio Pinogu Suwawa yang kemudian berpindah dan menyebar karena adanya perang saudara Mooduto - Pulumoduyo. Kelompok suku yang berpindah ke Atinggola berkembang menjadi *Pohala'a* tersendiri dan mendirikan Kerajaan dengan Rajanya yang pertama yakni Detubinaa, putera raja Bintauna (1320).

Pohala'a Atinggola merupakan perserikatan dari 3 (tiga) Linula, yakni : (1). Tihengo, dengan Raja bergelar Bolangodaa, (2). Moa'a, dengan Raja yang bergelar Bunagadan (3). Otajin, dengan Raja bergelar Atinggola. Selanjutnya berturut-turut yang menjadi Raja Atinggola sampai Raja Sunge (1860-1885).

3.3.5 Pohala'a Bolango

Seperti telah dikemukakan bahwa sebagian suku Pidodotiya di Bangio Suwawa berpindah ke Dumoga dan Bolaang Mongondow. Kelompok suku yang bermukim di Mongondow kemudian dikenal dengan sebutan Bolango. Disana mereka menjadi *Pohala'a* tersendiri yang berturut-turut dengan raja-raja : Wintune (1320), Dotulong (1350), Mogolaingo I (1381), Taniagu (1390), Nasyuma (1415) dan Tinthingiyo (1425). Dalam buku tua Suwawa, Raja Tinthingiyo yang menjadi Raja Bolango yang hadir pada pertemuan pertama *"Tuwawu Duluwo Limo lo Pohala'a"* yang diprakarsai oleh Gintulangi Raja

Suwawa pada tahun 1481. Tinthingiyo diganti oleh Mogolaingo II, Tangiadatu, Gubulo I, Mokosisi. Polingala dan Puluhulawa. Pada masa pemerintahan Gubulo I (1482) datanglah utusan dari Kerajaan Limboto. Oleh salah seorang Raja *Linula* Bolango yakni Pangidato dan permaisurinya Deopeygo diserahkan tiga orang cucunya (putera Moito adik Puluhulawa Raja Limboto yang terbunuh). Ketiganya adalah Pilohibuta, Datau dan Boyiodili. Sampai di Limboto ternyata yang diangkat menjadi Raja Limboto di Selatan adalah Pilohibuta. Datau merasa tersinggung karena tidak menjadi Raja, yang kemudian datang di Gorontalo dan diterima baik raja Gorontalo oleh Ntihedu. Kemudian Datau kawin dengan puteri Gomi adik Raja Ntihedu (anak Raja Polamolo) yang kemudian oleh Ntihedu diberikan wilayah Tapa, dimana Datau jadi Raja dari bangsa Bolango di Gorontalo.

Dengan keberadaan Datau menjadi Raja untuk suku bangsa Bolango di Tapa maka penduduk 7 (tujuh) desa di Kerajaan Limboto yang bersimpati kepada Datau pindah ke Tapa. Hal itu meresahkan pembesar - pembesar Kerajaan, para Kimalaha dan Raja Limboto Pilohibute. Akhirnya atas kesepakatan pihak Kerajaan di Limboto, Datau diundang ke Limboto yang kemudian diangkat menjadi Raja Limboto di Selatan (1535). Sejak 1535 Kerajaan Bolango di Tapa tidak ada lagi dan anti pada masa Raja Eyato di Gorontalo. Kerajaan Bolango dikembalikan lagi dengan Rajanya Mogolaingo II. Selanjutnya raja-raja yang memerintah di Bolango adalah Raja Datau II, Raja Biya dan Tilahunga. Pada tahun 1771 Tilahunga diangkat menjadi Raja Limboto sedang Bolango diperintah oleh raja - raja kecil sampai hilang riwayatnya pada tahun 1860.

3.3.6 Pohala'a Boalemo

Menurut Liputo (1943, IV:30) suku bangsa Boalemo berasal dari Lubu (Luwu) dengan pusat kerajaan yang bernama Tambelo. Kerajaan ini diperintahkan oleh seorang Raja yang sangat berjasa kepada negerinya sehingga raja ini sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Raja dan permaisurinya mempunyai yang bernama Latandarage dan seorang puteri yang bernama Rawe.

Pada suatu waktu Raja Luwu mendapat perselisihan dengan raja - raja dan negeri di sekitarnya. Baginda Raja dan Permaisuri yang dikenal sangat baik dan tidak menyukai perang ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan negerinya. Ternyata kemudian ditengah pelayaran terjadilah angin dahsyat yang menyebabkan rombongan Raja yang terdiri dari puluhan perahu menjadi terpencar. Sebagian rombongan perahu terdampar di Saluwa, sebagian di Banggai dan Mandonu. Sedang sebagian lagi bersama perahu baginda Raja dan Permaisuri terdampar di pulau Bawulemo di Teluk Tomini yang kemudian disebut Boalemo.

Sebagian rombongan yang terdampar di Banggai, kemudian ditawan oleh pasukan patroli dari Kerajaan Limboto yang waktu itu menguasai pulau - pulau di Teluk Tomini termasuk pulau Banggai. Oleh orang - orang Limboto tawanan ini disebut orang Boalemo karena tempat mereka di Banggai berbau limau sehingga menjadi petunjuk bagi tertawannya mereka. Akhirnya para tawanan tersebut (21 orang) menikah dengan orang-orang Limboto.

Karena tekanan dari pembesar - pembesar dan kaum ningrat di Kerajaan Limboto, maka keluarga orang-orang Boalemo meninggalkan Limboto pindah ke

Kayubulan dan akhirnya menetap di Tilamuta. Disana mereka menemukan orang – orang perantau yang berasal dari pulau Bawulemo. Himpunan orang – orang Boalemo makin berkembang dan akhirnya menjadi satu Pohala’a tersendiri dengan raja - rajanya secara berturut - turut yakni : Raja Palowa, Polleat, Arsadi, Mohe, Mayuru, Mustapa dan Idrusi. Pada tahun 1870 (sumber lain 1862) Pohala’a Boalemo dimasukkan dalam lingkungan kesatuan Duluwo Limo lo Pohala'a Gorontalo, setelah Pohala'a Bolango berakhir pada tahun 1861.

3.4 Hubungan Genealogis Antar Pohala’a

Seperti telah dikemukakan bahwa penduduk Suwawa, Atinggola, Bintauna, Kaidipan Besar dan Bolaang Uki berasal dari suku Pidodotiya yang tinggal di dataran tinggi Bangio – Pinogu Suwawa. Sebagian yang berpindah dan menyebar kearah barat Bangio dikenal sebagai suku *Yitohiya* atau *Witohiya* yang artinya *ta lo yitohu* (mengembara). Suku ini akhirnya berkembang menjadi penduduk daerah Gorontalo. Kecuali Suwawa dan Atinggola. Penduduk yang menetap di Suwawa menjadi *pohala’a* Suwawa, yang tinggal di Atinggola menjadi *pohala'a* Atinggola. Suku *Yitohiya* yang tinggal dan berkembang di Limboto menjadi *pohala’a* Bolango, yang tinggal di Gorontalo menjadi *pohala’a* Gorontalo dan terakhir yang tinggal di Boalemo menjadi *pohala'a* Boalemo (campuran dengan suku Bone dari Luwu).

Kesatuan genealogis masyarakat lima *pohala'a* ditandai pula dengan adanya ikatan kekeluargaan dari raja – raja dalam lingkungan lima *pohala’a*

terutama 3 (tiga) *pohala'a* besar yakni *pohala'a* Suwawa, Limboto dan Gorontalo. Ikatan kekeluargaan dari raja – raja tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Raja Gorontalo yang pertama yakni puteri Bulaidaa (1360-1385) adalah adik dari raja Mooduto dari kerajaan Suwawa.
2. Puteri Gealo (cucu Tolangohula) raja Limboto disuamikan oleh Humolangi raja Gorontalo (Humolangi adalah putera Bulaidaa).
3. Ranelolalo (putera Tolangohula, raja Limboto) menjadi raja kerajaan Suwawa.
4. Raja Tobuto (putera Humolangi dari Gealo) menjadi raja kerajaan Limboto, sedang putera Humolangi dari Rawe (raja Bone) sesudah suaminya raja Mooduto meninggal yakni Wadipalapa (llahudu) menjadi raja Gorontalo.
5. Wadipalapa, raja Gorontalo beristerikan Lailabunggio puteri raja Sendeno raja Bintauna.
6. Raja Uloli I (putera Wadipalapa) raja Gorontalo beristerikan puteri Mitu raja Limboto.
7. Raja Gorontalo Wolango I (putera raja Uloli) beristerikan raja Limboto Moliye I (puteri raja Datau I) yang menggantikan puteri Mitu (1421 – 1452).
8. Raja Polamolo (putera Wolango I dan Moliye I) menjadi raja persatuan dari kerajaan Kembar Limboto - Gorontalo (1452 – 1461).

9. Puteri Moliye I (ibu raja Polamolo) menjadi raja Limboto kembali sesudah Polamolo terbunuh, mengangkat cucunya Ntihedu menjadi raja Gorontalo (1461 – 1482).
10. Ntihedu menjadi raja Gorontalo, sepupunya Datau II menjadi raja Bolango dan raja Limboto to huliya dan kakak raja Datau yakni Pilohibuta menjadi raja Limboto totilayo.
11. Wutileni raja Gorontalo (anak Ilato raja Limboto) beristerikan raja Tilahunga yang juga menjadi raja Bolango (1511).
12. Puteri Moliye II raja Limboto bersuamikan Detu raja Gorontalo (1511) yang kemudian berputera Amai raja Gorontalo pada tahun 1575.
13. Bumulo I menjadi raja Suwawa (1600 – 1632), menjadi raja Gorontalo pada (1632 – 1647) dan menjadi raja Limboto pada (1647 – 1680). Sumber lain menyebutkan bahwa menjelang perjanjian perdamaian *U Duluwo Limo lo Pohala'a*, Bumulo menjadi raja Gorontalo di utara merangkap raja Limboto di selatan. Silsilah pada buku tua dikemukakan bahwa Bumulo I adalah putera raja Bobihu (kerajaan Suwawa), kemenakan raja Limboto Tilahunga dan jadi cucu dari Gintulangi raja Suwawa.
14. Puteri Moliye III, raja Limboto bersuamikan raja Eyato dan kemudian menjadi raja persatuan Limboto – Gorontalo, Gorontalo – Limboto.
15. Luadu, raja Gorontalo (1640 – 1700) menjadi raja Suwawa (1700 – 1715).
16. Lahay, putera Luadu menjadi raja Limboto tohuliya (1700 – 1772) merangkap raja Gorontalo (1700 – 1715) dan raja Suwawa (1715 – 1718).

17. Abdul Rauf putera raja Lahay menjadi raja Suwawa (1718 – 1757) dan menjadi raja Limboto to Tilayo (1715 – 1718).
18. Pulumoduyo II putera Abdul Rauf cucu Lahay menjadi raja Suwawa dan raja Limboto (1757 – 1800).
19. Pui Monoarfa raja Gorontalo juga merangkap raja Limboto dan raja Suwawa (1800 – 1828).
20. Hasan Monoarfa raja Gorontalo (1836) merangkap raja Limboto (1838 – 1841).

Dapat dikemukakan bahwa karena kesatuan genealogis dari masyarakat lima *pohala'a* Gorontalo hidup dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu (wilayah Kabupaten dan Kotamadya Gorontalo sekarang) maka kesatuan genealogis masyarakat lima *pohala'a* Gorontalo merupakan kesatuan genealogis teritorial (Botutihe & Daulima, 2007:37).

3.5 Kesatuan Hukum Adat Tata Negara

Istilah hukum adat tata negara (adat *staatsrecht*) digunakan untuk pertama kali oleh Van Vollenhoven pada tahun 1918. Adat *staatsrecht* dari Van Vollenhoven adalah hukum tentang *Indonesische Rechts Gemeenschappen* yang diterjemahkan dengan "hukum adat mengenai tata negara", yakni hukum adat yang mengatur organisasi – organisasi persekutuan rakyat yang kecil – kecil seperti suku dan kampung (Suhardi dan Van Dijk, 1954:15 dan Koesnoe, 1972:3). Dipahami terdapat beberapa perbedaan dalam pengertian dan cakupan konsep adat *staatsrecht* namun perbedaannya tidak terlalu prinsipil. Pada dasarnya semua

konsep yang ada mengacu kepada aspek – aspek masyarakat hukum, lapisan sosial masyarakat, pemerintah, pembuat peraturan – peraturan, peradilan dan hukum antar tata hukum adat (Nur, 1979:9). Untuk kepentingan sesuai tujuan penelitian, maka aspek – aspek tersebut dalam hukum adat tata negara dilingkungan lima *pohala'a* ataupun dalam perserikatan *U Duluwo Limo lo Pohala'a* tidak dikemukakan secara keseluruhan tetapi di fokuskan kepada masyarakat hukum sebagai aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini tidaklah mengurangi penyajian aspek – aspek hukum adat tata negara terutama dari *U Duluwo Limo lo Pohala'a* karena aspek lapisan sosial masyarakat, pemerintahan, pembuat hukum antar tata hukum adat Gorontalo sudah terkait dalam pengkajian mengenai masyarakat hukum yang akan dikemukakan di bawah ini (Botutihe & Daulima, 2007:42).

Struktur masyarakat hukum Gorontalo secara vertikal tersusun dari *laihe*, *lemboa*, *linula* dan *pohala'a* yang antara lain telah dikemukakan sebelumnya. Aspek struktur masyarakat hukum yang penting yang belum dikemukakan sebagai unsur pengikat kesatuan *linula* atau *pohala'a* adalah unsur *lipu* (negara). Menurut Berahim (dalam Nur, 1979:41) unsur *lipu* meliputi 3 faktor yakni : *Huta* (tanah, wilayah), *Tawu* (rakyat / penduduk) dan *Bubato* (pemerintah). Unsur-unsur *lipu* yang dikemukakan tidaklah lengkap untuk memenuhi syarat eksistensi suatu negara. Negara sebagai organisasi teritorial suatu bangsa / suku bangsa perlu dilengkapi dengan syarat yang keempat yakni unsur kedaulatan (Maritain, 1956:29).

Unsur kedaulatan sebagai atribut negara meliputi kedaulatan dalam aspek intern (*de facto*) yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu kesatuan politik, apakah itu kekuasaan rakyat, hukum, Tuhan atau Raja. Aspek kedaulatan lain adalah aspek ekstern (*de yure*), berkaitan dengan pengakuan institusi negara lain atas kedaulatan *de facto* atau kedaulatan dalam hubungan antar negara Kedaulatan ekstern lebih lazim disebut "Kemerdekaan" (*independence*) Yacobsen & Lipman, (1956:38). Dari segi hukum adat tata negara Gorontalo, kedaulatan ekstern merupakan hukum antar hukum adat.

Berdasarkan unsur – unsur *lipu* yakni : (1). tanah, wilayah (2). rakyat, penduduk, (3). pemerintah dan (4). kedaulatan; maka pengkajian masyarakat hukum dalam kesatuan hukum adat tata negara dalam lingkungan kesatuan lima *pohala'a* Gorontalo perlu diarahkan pada fase perkembangan sejarah daerah yang memiliki karakteristik unsur – unsur lipu seperti yang dikemukakan. Dalam hal ini 3 (tiga) unsur pertama merupakan unsur klasik dari awal keberadaan kerajaan – kerajaan dalam lingkungan lima *pohala'a* Gorontalo. sedang unsur ke 4, yakni kedaulatan baik kedaulatan intern maupun kedaulatan ekstern perlu dikaji secara cermat dalam sejarah perkembangan kesatuan lima *pohala'a* Gorontalo.

Kalau diperhatikan maka sebenarnya dasar – dasar persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kehidupan lima *pohala'a* telah dicanangkan secara kuat oleh para sesepuh – sesepuh kerajaan. *Tolangohula* sebagai peletak dasar persatuan dan kesatuan di *pohala'a* Limboto, Wadipalapa sebagai raja pemersatu bahkan Gintulangi (raja Suwawa) telah memprakarsai perserikatan *Tuwawu Duluwo Limo lo Pohala'a* (1481). Demikian pula raja - raja persatuan yang telah memerintah

dua atau tiga *pohala'a* sekaligus seperti raja Polamolo, raja Ntihedu, raja Wutiliteni, raja Bumulo, raja Lahay, raja Abdul Rauf, raja Pulumoduyo II, raja Pui Monoarfa dan Hasan Monoarfa. Namun kondisi persatuan dan kesatuan pada pihak – pihak *pohala'a* belum menjamin eksistensi kedaulatan baik kedaulatan intern maupun kedaulatan ekstern. Persatuan dan kesatuan belum meliputi ke lima *pohala'a* di Gorontalo bahkan sejak raja Polamolo sampai raja Bumulo kedaulatan itern dan ekstern *pohala'a* terancam dengan adanya perang Saudara Gorontalo – Limboto. Kedaulatan intern yang memanifestasikan adanya kesatuan politik kedalam lingkungan lima *pohala'a* baru tercermin pada masa raja Eyato yakni sejak perjanjian damai kerajaan Gorontalo dengan kerajaan Limboto yang dipatrikan melalui janji U DULUWO LIMO LO POHALA'A tepatnya pada 12 Sya'ban 1084 H. Jadi pada akhir bulan November 1673 terakhir Masehi, Bastiaans dalam (Taufik Abdullah, 1990:207).

Perjanjian *U Duluwo Limo Lo Pohala'a* adalah perjanjian untuk mengakhiri perang saudara Gorontalo – Limboto yang telah berlangsung hampir 200 tahun (antara 1480 – 1673). Perjanjian ini diprakarsai oleh kedua tokoh kerajaan yakni Jogugu Eyato (sebelumnya sebagai *Lebida'a*) dari kerajaan Gorontalo dan Jogugu Popa dari kerajaan Limboto. Proses perjanjian dan naskah perjanjian yang lengkap dapat dilihat pada catatan Sikili Talue Wasin, Bastiaans atau pada Taufik Abdullah (1290, 199:236). Isi pokok perjanjian yang utama adalah dibentuknya persekutuan *U Duluwo Limo Lo Pohala'a* Gorontalo – Limboto, Limboto – Gorontalo yang kemudian diikuti oleh tiga *pohala'a* lainnya yakni Suwawa, Atinggola dan Bolango, Menurut Liputo (II:22), Haga (1931:187)

setelah berakhirnya kerajaan Bolango maka *pohala'a* Boalemo dimasukkan menjadi anggota perserikatan *U Duluwo Limo lo Pohala'a* pada tahun 1870.

Dengan demikian perserikatan *U Duluwo Limo lo Pohala'a* adalah perserikatan *pohala'a* yang kedua, sesudah perserikatan *Tuwawu Duluwo Limo lo Pohala'a* yang diprakarsai oleh Gintulangi (raja Suwawa) pada tahun 1481, dimana *U Duluwo* adalah perserikatan kerajaan Suwawa dan Limboto.

Dari *U Duluwo Limo lo Pohala'a* sebagai serikat lima *pohala'a* di Gorontalo, kemudian pada 1 syawal 1084 diperluas menjadi perjanjian 7 kerajaan yakni : (1). Ternate, (2). Suwawa, (3). Mongondow, (4). Limboto – Gorontalo, Gorontalo – Limboto, (3). Bintauna, (6). Bolango dan (7). Atinggola (Nur, 1979:233). Setelah terbentuknya perserikatan *Duluwo Limo lo Pohala'a* yang diikuti dengan perjanjian 7 kerajaan maka kemudian dibentuk serikat kerajaan di luar *pohala'a* luar yang memiliki ikatan perjanjian dengan *U Duluwo* yakni : (1). kerajaan Gowa, (2). Ternate, (3). Tomini Bocht (Tomini – Poso), (4). Mongondow dan (5). Kaidipan Besar (Liputo, 1943, IV : 57 – 58). Dari sumber yang sama kemudian Tomini Bocht diganti oleh kerajaan Mandar (Manelo).

Status *U Duluwo Limo lo Pohala'a* sebagai *lipu* (negara) dalam ikatan perjanjian dengan *pohala'a* luar seperti yang dikemukakan secara tersirat mengandung pernyataan pengakuan atas kemerdekaan yang merupakan implementasi dari kedaulatan ekstern yang memperkuat eksistensi kesatuan masyarakat hukum dalam hukum adat tata negara dari perserikatan *U Duluwo Limo lo Pohala'a* di Gorontalo.

Sebagai masyarakat hukum, serikat *U Duluwo Limo lo Pohala'a* yang tidak memiliki Maharaja khusus itu, membentuk tiga alat perlengkapan serikat yakni :

(1) Huhulogo lipu teto – teya, teya – teto

Huhulogo lipu teto - teya, teya - teto, satu Badan Pekerja tetap yang disebut *Tolomato lo Hinggia*. Badan itu beranggotakan 6 orang yakni : (1). *Wu'u* lo Suwawa (Ketua Bantayo Poboide kerajaan Suwawa), (2). *Molowahulo* Limutu (Pejabat yang memata – matai tindakan pembesar di Limboto, (3). *Patila molowahulo* lo Hulontalo (Pejabat yang memata – matai pembesar kerajaan Gorontalo), (4). *Mopatu Langolo*. (5). *Mopatu Hulita*. (6). *Mopatu Tania*. Nomor 4, 5, dan 6 adalah pembesar - pembesar bidang pertahanan dan keamanan yang bermukim pada kediaman resmi di *Dehuwalolo*.

(2) Tonggulanga lo bulito

Tonggulunga lo bulilo, memegang urusan perang dan kerusuhan yang beranggotakan para *Mopatu* dari kerajaan Limboto dan para Talenga dan Kapitan laut dari kerajaan Gorontalo.

(3) Butogo Syara'

Butogo Syara' (pengadilan Agama) yang beranggotakan para mufti dan dua kadli dari dua kerajaan.

Dari uraian tersebut yang telah dikemukakan, maka unsur – unsur *lipu* (negara) yakni : (1). tanah, wilayah, (2). rakyat, penduduk (3). pemerintah dan (4). kedaulatan (secara politik intern dan ekstern), untuk pertama kalinya berlaku

dalam sejarah Gorontalo yakni sejak perjanjian *U Duluwo Limo lo Pohala'a* pada 12 Sya'ban 1084 atau tepatnya pada tanggal 26 November 1673. Perjanjian yang pada dasarnya berisi sumpah kesatuan itu (sumpah Popa – Eyato) mengandung filosofi kesatuan yang mendalam antara lain ungkapan seperti perkawinan adalah "lo nikah lo nyawa" (nikah dengan nyawa). Demikian pula ungkapan bahwa sejak saat ini "tidak ada lagi ungkapan negeri kami, negerimu, negeriku, negerinya dan negeri kamu : yang ada adalah negeri kita" yang disimpulkan dalam pepatah Gorontalo. *"Otola Ayuwa, Odungga Ayuwa"* (Liputo, III:24). Sumpah - sumpah persatuan itu diakhiri dengan sumpah Eyato dalam bahasa Arab yang berbunyi : La iyataa baddal wa layataqayyar ilaa yaumil qiamah (Liputo, 1945:24 – 25), yang artinya tidak dapat diganti dan tidak dapat diubah sampai hari kiamat.

Selain filosofi kesatuan yang terkandung pada naskah perjanjian *U Duluwo Limo lo Pohala'a*, secara historis naskah perjanjian itu merupakan bukti sejarah tertulis yang pertama dalam sejarah *U Dulowo Limo lo Pohala'a* di Gorontalo.

3.6 Kesatuan Politik – Kultural

Politik dan kultural suatu bangsa merupakan manifestasi jiwa dari suatu bentuk masyarakat dan negara. *Lipu* (negara) dengan unsur - unsur tanah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan lebih berkonotasi statis dari gambaran suatu masyarakat hukum. Demikian pula halnya dalam kesatuan *U Duluwo Limo lo Pohala'a* di Gorontalo. Dalam hal ini politik dan kultural merupakan dua variabel *reciprocal* (timbal balik), yang saling interdependensi antara yang satu dengan

yang lain. Kultur masyarakat *U Duluwo Limo lo Pohala'a* bersumber pada falsafah adat yang bersendikan pada ketentuan – ketentuan alam. Prinsip keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat telah diajarkan oleh alam, prinsip mana seperti hal adanya siang dan malam, panas dan dingin, asin dan asam, manis dan pahit, hidup dan mati dan sebagainya. Adat yang berkembang menjadi adat istiadat adalah himpunan dari kaidah – kaidah sosial (norma) yang sejak lama dipelihara oleh masyarakat, yang maksudnya untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Dungga (dalam Nur, 1979:197) menambahkan bahwa benda – benda alam (dengan segala sifatnya) yakni : (1). *Dupoto* = angin, (2). *Tulu* = api, (3). *Taluhu* = air, (4). *Huta* = tanah. Merupakan dasar falsafah adat yang menyempurnakan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kultur alam memberikan corak terhadap kultur masyarakat yang sekaligus memberi corak terhadap politik dalam arti pengaturan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tersirat pada *tujai* (syair) yang diucapkan pada pelantikan Raja Ilahudu, yang berbunyi :

Taluhu, taluhu ito Eya Tulu, tulu lo ito Eya Dupoto, dupoto ito Eya Huta, huta ito Eya Bo diya poluliya hilawo, Tapulu,

Air, airnya Tuanku Api, apinya Tuanku Angin, anginnya Tuanku Tanah, tanahnya Tuanku Tapi jangan dibuat sewenang – wenang, Tuanku.

Untuk menjaga kesewenang – wenangan, maka oleh Raja Eyato keempat benda alam yang menjadi dasar falsafah adat itu ditambah dengan unsur manusia, yakni rasa atau budi. Sehingga oleh Dungga dikemukakan bahwa terdapat lima

dasar utama dari pada falsafah adat *U Duluwo Limo lo Pohala'a* yang disebutnya Panca Askaratama, yakni : (1). Angin, (2). Api, (3). Air, (4). Tanah dan (5). Budi. (Seminar Adat Gorontalo : 130, 131, 138).

Selanjutnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka sumber dari semua kaidah yang menjadi cermin perilaku politik – kultural adalah kaidah *Butu Topayu* yang kemudian menjadi *Payu lo Lipu* atau dasar negara dari *U duluwo Limo lo Pohala'a*, yakni :

Bangusa Taalalo, Lipu Poduluwalo, Batanga Pomaya, Harata Potombulu, Nyawa Podunggalo.

Bangsa dijaga, Negara dibela, Diri diabdikan, Harta direlakan/diamalkan, Nyawa dikorbankan. (B. Ismail dalam S.R.Nur. 1979:196)

Payu lo Lipu dimaksud adalah rumusan perjanjian antara Maharaja dengan rakyat melalui *olongia – olongianya*. Siapa yang mengubahnya akan luluh lantak dan hancur lebur seperti lemak kerbau yang dipersembahkan (Kaluku, 1968:26). Hal ini antara lain dipaterikan melalui *tujai* (syair), sebagai berikut :

Dahayi qu qo huliya. Lo payu lo lipu. Hipakuwa lo tadiya. To tilayo to huliya.

Jagalah, jangan dilalaikan. Dasar – dasar negara. Yang dikokohkan dengan sumpah. Di utara dan di selatan (Liputo : 1943 : 29).

Implementasi dari *Payu lo Lipu* dalam hubungan kedaulatan rakyat dengan kekuasaan pemerintah serta peradilan (hukum) didasarkan pada 5 (lima) sumber hukum adat (adattermen) yang disebut *Butogo limo* yakni : (1). *Wugudu*, (2).

Adati, (3). *Tinepo*, (4). *Tombulago* dan (5). *Buto'o*. *Wugudu* adalah aturan tingkah laku yang resiko atau sanksinya dapat diletakkan oleh masyarakat sendiri melalui perubahan tingkah lakunya. *Wugudu* berkaitan dengan kesadaran norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (kebiasaan). *Adati* adalah kebiasaan yang bila dilanggar memperoleh sanksi dari masyarakat. *Tinepo*, perhatian atasan terhadap bawahan, yang dapat disebut sebagai pertimbangan. *Tombulago* adalah penghargaan bawahan atas perhatian atasan. Sedang *buto'o* adalah hukum.

Dalam hubungan dengan adattermen di atas, Bobihu (dalam Nur, 1979:193) memberikan penafsiran terhadap adattermen tersebut dengan : (1). *wugudu* = kesempurnaan, (2). *adati* = tata keteraturan, (3). *tinepo* = tata keadilan, (4). *tombulago* = tata ketegasan / kebijaksanaan dan (5). *Buto'o* = tata hukum (Seminar Adat Gorontalo, 1971:160).

Sesudah masuknya Islam khususnya pada masa Raja Eyato, dimana Islam dinyatakan sebagai agama resmi kerajaan, prinsip adat bersendi syara', syara' bersendi adat menjadi 3 prinsip adat, adat bersendi syara’, syara' bersendi Kitabullah (Al Qur'an). Dasar – dasar falsafah adat, sumber hukum adat (*butogo limo*) tidak dirubah tapi dalam implementasinya pada setiap lembaga adat disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini bila sebelumnya falsafah adat, dasar – dasar adat lebih diilhami oleh ajaran atau sifat – sifat alam, maka sejak masa raja Eyato ketentuan dan pelaksanaan adat harus mengacu kepada ajaran agama Islam, sebagai agama resmi kerajaan.

Dalam hal kerajaan sebagai bentuk negara (*lipu*), Eyato memberi arti terhadap negara sebagai organisasi kekuasaan. Mengingat kekuasaan tertinggi dalam alam dan dalam kehidupan manusia adalah terletak pada Tuhan, maka pemegang kekuasaan negara harus memiliki sifat – sifat Tuhan, yang terdiri dari sifat *nafsia*, sifat *salbia*, sifat *maani* dan sifat *ma'nawiyah*. Sifat *nafsia* adalah sifat kepribadian. Antara lain *lipu* (negara) adalah bersifat *nafsia* yakni berwujud (ada) tetapi keberadaannya tidak dapat dilihat dan dipegang, melainkan melalui tindakan dan ciptaan-Nya. Sedang sifat *salbia* meliputi sifat – sifat : *qidam, bagaa, muchaalafatuhu lilhawwaditsi, qiyaamuhi binafsihi* dan sifat *wahdaniah*.

Sifat *qidam* (setia), dibajukan kepada Kapitan Laut. Mayur – Mayur dan Taqulio. Petugas yang memiliki sifat *qidam* tidak mengenal waktu dan resiko serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sifat *bagaa* (kekal, tidak musnah) dibajukan kepada kadli dan Mputi, Imam – imam dan perangkat tugas agama lainnya. Petugas yang memiliki sifat *bagaa*, tidak dapat memihak dan tidak dapat dipengaruhi oleh hal – hal yang diluar ketentuan agama. Sifat *muchaalafatuhu lilhwwaditsi* (berlainan dengan makhluk). Petugas yang memperhatikan sifat ini menghindari sifat – sifat manusia biasa seperti marah, benci, rakus, sombong, menipu, mencuri, berzina, dan lain-lain. Bila petugas memiliki sifat – sifat ini maka hukumnya lebih berat dari rakyat biasa yang memiliki sifat yang sama. Sifat ini dibajukan kepada Maharaja dan kepada pemimpin pada umumnya. Sifat *qiyaamuhu binafsihi* (berdiri atas pendapat sendiri). Petugas yang memiliki sifat ini tidak mudah menerima hasutan, tidak mudah menyeleweng. Sifat ini dibajukan kepada *Baate* dan *Wu'u* serta petugas

pengadilan. Sifat *wahdaniah* (tunggal – esa), dibajukan kepada *lipu* yakni seluruh rakyat dan pembesar – pembesar kerajaan dalam upaya tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat.

Sifat *maani* dan *ma'nawiyah* meliputi 7 sifat yakni : (1). sifat kodrat, *kaadirun*, (2). iradat, *muriidun*, (3). ilmu, *aalimun*, (4). hayat, *hayyun*, (5) – (6) *sama'* dan *basara* dan (7). kalam, *mutakallimun*. Sifat kodrat, *kaadirun*, dibajukan kepada *Wulea lo lipu Bilinggata*, yang memegang kekuasaan keamanan, ketenteraman dan keuangan serta dengan menggunakan lambang merah. Sifat iradat, *muridun* (yang disukai, yang diinginkan) dibajukan kepada *Wulea lo lipu Lupoyo*, bertugas dalam urusan perhubungan darat dan laut, irigasi, perindustrian, kesenian dan hal – hal lain yang bersifat untuk kepentingan umum serta menggunakan lambang kuning. Sifat ilmu, *aalimun* (mengetahui) dibajukan kepada *Wulea lo Lipu Wuabu* yang bertugas pendidikan, agama, adat, kehakiman dan pengadilan warisan dengan menggunakan lambang ungu sebagai lambang kedewasaan. Sifat hayat, *hayyun* (hidup) dibajukan kepada *Wulea lo Lipu Hunginaa* yang bertugas di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kesehatan dengan menggunakan lambang warna hijau. Sifat *sama'* dan *basara* (mendengar dan melihat) dibajukan kepada para *Walagopulu*, yang bertugas mendengar dari rakyat mengenai pengeluhan – pengeluhannya, kemudian dipikirkan dan diteruskan kepada atasan, serta mendengar dari atasan dan diteruskan kepada bawahan. Sifat kalam, *mutakallimun* (berbicara) dibajukan kepada anggota *Bantayo Poboide*, untuk berbicara mengenai Hal – hal yang bertalian dengan kepentingan rakyat.

Hal – hal yang telah dikemukakan, memberikan gambaran adanya kesatuan politik – kultural baik yang diilhami oleh sifat - sifat alam (sebelum Eyato) dan yang ada ajaran Islam. Karateristik kesatuan politik – kultural yang bernafaskan Islam seperti yang dikemukakan terakhir adalah sebagai pengejawantahan dari prinsip adat bersendi syara' dan syara' bersendi Al - Qur'an yang telah dicanangkan oleh raja Eyato mendahului kurang lebih 150 tahun dari kaum Wahabi di Minangkabau dalam menerapkan prinsip adat bersendi syara' dan syara' bersendi Kitabullah. Dan seperti diketahui bahwa dengan prinsip itulah Van Vollenhoven meletakkan kebudayaan Gorontalo sebagai provinsi kebudayaan yang ke IX dari 19 kelompok kebudayaan di Nusantara. Dalam hal ini di bidang politik dan kebudayaan. Richard Tacco (1935) mensejajarkan Eyato dengan Solon dari kerajaan Griek Athena, karena Eyato adalah : (1). pembuat Undang – Undang, (2). pendamai ulung antara kerajaan Limboto dan Gorontalo yang telah berperang selama hampir 200 tahun dan (3). pada masa pemerintahan Eyato terdapat pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik tersebut ditunjuk oleh fakta sejarah dimana pada masa itu di Inggris masih berlaku sistem kerajaan dengan raja yang berkuasa mutlak maka di Gorontalo telah berlangsung sistem kerajaan yang bersifat monarki konstitusional yang demokratis, *datahu lo huntu huidu* (1935:106). Demikian pula Eyato telah mempertegas pemisahan kekuasaan Maharaja / Raja dengan *Bantayo Poboide* selaku Badan Pembuat Undang – Undang serta dengan kekuasaan pengadilan. Selain itu hal yang penting dari sudut historis – kultural adalah mulainya budaya baru dalam fase sejarah *U Duluwo Limo lo Pohala'a*. Eyato telah membuka lembaran sejarah baru dalam dunia

informasi dan administrasi dari masyarakat *U Duluwo Limo lo Pohala'a* melalui penulisan naskah Perjanjian *U Duluwo Limo lo Pohala'a*. Naskah perjanjian tersebut terdiri dari 17 pasal ditambah satu pasal sumpah, merupakan bukti sejarah dalam bentuk tulisan yang pertama dalam sejarah *U Duluwo Limo lo Pohala'a*. Sejak penandatanganan Naskah Perjanjian UDLP oleh Popa (mewakili Limboto) dan Eyato (mewakili Gorontalo) pada 12 Sya'ban 1084 H (26 November 1673) maka semua hasil keputusan Dewan Kerajaan, keputusan sidang *Bantayo Poboide*, keputusan pengadilan, perintah – perintah keamanan dan lain – lain yang penting selalu dibuat secara tertulis, karena menurut Eyato hal itu adalah sesuai dengan syariat. Dengan pengertian lain Eyato telah memelopori pembudayaan (enkulturasi) di bidang tulis – menulis (dengan ejaan Arab Latin) dalam kehidupan masyarakat UDLP.

Dengan berdasarkan seluruh karya (*ilomata*) dari raja Eyato, maka Liputo mengemukakan bahwa Eyato adalah raja yang memiliki sejarah yang gilang gemilang dalam sejarah UDLP (1950, XII:30).

Namun keberhasilan raja Eyato dalam mencanangkan kesatuan politik dan kultural dalam lingkungan UDLP, hal itu semata – mata bukan keberhasilannya sendiri. Dalam kepemimpinannya Eyato menerapkan kepemimpinan kolegial, dimana Maharaja dibantu oleh Dewan Kerajaan tetapi Dewan tersebut tidak berada di bawah Maharaja melainkan memerintah secara bersama – sama. Demikian pula peranan *Bantayo Poboide* sebagai pembuat Undang – Undang dan sebagai pengamat dan pengawas segala kebijaksanaan Maharaja. Dalam hal ini Maharaja adalah sebagai pelaksana kekuasaan yang tidak tak terbatas.

Di balik keberhasilan dan kecemerlangan sejarah UDLP pada masa raja Eyato, barangkali sejarah UDLP menjadi lain bila tidak ditunjang oleh itikad baik, kepintaran dan kebijaksanaan dari Jogugu Limboto yakni Popa yang telah bersama – sama Eyato mematerikan Sumpah Janji *U Duluwo Limo lo Pohala'a* Gorontalo. Kesamaan dan kepintaran Popa dan Eyato sampai kini masih populer di kalangan masyarakat UDLP yang diuangkapkan melalui Tujai (*syair*) sebagai berikut :

Ti Popa woli Eyato, Tutuwawu langgato, Ti Eyato woli Popa, Tutuwawu tota, Odelo dungobongo pilopota.

Ti Popa woli Eyato, Ta loqo patato, Uduluwo mohutato, Ti Eyato woli Popa Ta loqo pongotota, uito dila dulota

Popa dan Eyato Sama – sama tinggi, Eyato dan Popa Sama – sama kepintaran, Seperti daun kelapa yang dipangkas

Popa dan Eyato, Yang menjelaskan Dua bersaudara, Eyato dan Popa, Yang memberitahu Itu yang tidak berdua (Botutihe & Daulima, 2007:65).

3.7 Penduduk dan Bahasanya

Bahasa adalah alat komunikasi yang dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran terhadap orang lain. Salah satu fungsi bahasa adalah agar anggota masyarakat dapat menaati peraturan tata hidup yang telah dituangkan dalam bentuk budaya. Cara bertutur masyarakat Gorontalo terhadap sesamanya

mencerminkan kehidupan mereka yang senantiasa menginginkan persaudaraan yang erat.

Penggunaan bahasa Gorontalo sebagai alat komunikasi antar sesama, berlangsung dalam kehidupan sehari – hari dan Malam upacara adat. Disamping itu bahasa Gorontalo juga menjadi alat penyampaian sastra, baik lisan maupun ditulis dengan huruf arab – pegon, seperti *"tuladu me'eraji"* (tulisan buku me'raj), *"tuladu turunani"* (tulisan buku turunani) *"tuladu dikili"* (tulisan buku zikir) dan lain – lain (Daulima, 2006:9)

Pada masa lalu, bahasa Gorontalo mengenal variasi bahasa yang berlaku untuk golongan bangsawan, untuk tingkat menengah dan untuk rakyat jelata. Perbedaan ketiga variasi bahasa ini terutama ditandai oleh perbedaan pemakaian kata – kata :

1. Untuk menyapa raja – raja atau variasi bahasa istana, dipakai kata – kata, *Eyanggu*, *Tapulu Ti Tulunani*, Mandi (*molombingo*), Makan (*mola melo*), dan lain-lain.
2. Untuk variasi bahasa tingkatan menengah yang disebut *wali – wali mowali*, memakai kata – kata yang lebih halus dari orang kebanyakan seperti, langsung pada jabatannya seperti : *Ti Wuleya* (camat), *Ti Baate* (ketua adat), *Ti Kimalaha* (pemangku adat), *Ti Ta'uda'a* (kepala kampung), *Ti Kadli* (kadli), *Ti Imamu* (imam) dan seterusnya.
3. Bagi rakyat / masyarakat biasa, panggilan sapaan (*toli*), misalnya *Ti Bapu* (kakek), *Ti nene* (nenek), Mandi (*Lihu*), Makan (*Longa*) dan lain-lain.

4. Bahasa adat yaitu bahasa yang dipakai saat dialog adat dalam *"huhulo'a lo adati"* artinya bahasa dalam persidangan adat, dan juga *"Wulito tolobalango"* (penuturan pada acara pernikahan / peminangan).

Selain dari variasi bahasa, perbedaan golongan masyarakat juga dapat dikenal melalui pola dan warna busana yang dipakai pada acara adat. Masyarakat mengenal 4 (empat) warna adat yang disebut *"Tilabatayila"*, yaitu warna ungu bermakna kewibawaan / keanggunan. Warna merah bermakna keberanian / kepahlawanan, warna kuning emas bermakna kemuliaan, dan warna hijau bermakna kedamaian / kesuburan. Keempat warna ini disatukan pada tutup kepala pejabat negeri yang disebut *"Payunga tilabatayila"* atau destar empat warna. Destar atau *Payungo* ini bermakna bahwa keempat makna warna ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin negeri.

Pola busana adat pun membedakan golongan masyarakat, yaitu :

1. *Bo'o Takowa Da'a*, jas yang berkerah cina dengan kancing tiga untuk raja.
2. *Bo'o Takowa Kiki*, jas yang berkerah cina dengan kancing dua untuk pejabat negeri atau perangkat pemerintah sampai dengan camat dan lurah.
3. *Bo'o Kini*, semi jas berkerah cina terbuka sampai didada untuk para *wali – wali mowali*, remaja dan perangkat kelurahan.
4. *Galenggo* berhias di dada dan lengan serta bagian bawah, untuk *Mbu'i* / ratu.
5. *Galenggo* berhias di leher dan lengan, untuk para isteri camat dan isteri pejabat pemerintahan negeri.

6. *Galenggo* tanpa hiasan, untuk ibu – ibu dan para remaja biasa

3.8 Agama dan Kepercayaan

Agama yang dianut oleh masyarakat Gorontalo adalah agama Islam, yang mencapai puncak kejayaannya pada zaman Raja Eyato tahun 1673. Raja Eyato inilah yang menetapkan falsafah hidup masyarakat Gorontalo adat bersendi syara', syara' bersendikan Kitabullah (Al - Qur'an), dan menata pemerintahan secara Islami.

Masyarakat gorontalo asli penganut agama Islam, tetapi tanda – tanda animisme masih ada pada sebagian anggota masyarakat, seperti percaya pada cecak yang berbunyi sebelum melangkah pergi, bayi yang sedang tidur, diletakkan cermin dan gunting dibagian kepalanya dan lain – lain, seperti jimat atau benda yang dianggap mempunyai daya magis untuk penangkal setan, jin dan roh halus.

Pada musim wabah penyakit atau kemarau panjang diadakan upacara *"dayango"* yaitu pemujaan kepada penjaga empat sudut alam, untuk memohon kesuburan tanah, mengusir para pembawa penyakit, dan upacaranya di akhiri dengan *"mohilihu"* atau menghangatkan sesajian disungai. Demikian pada pasca panen diadakan persembahan sesajian yang disebut *"Mopo'a Huta"*, sebagai upacara syukur. Kini upacara seperti ini, mulai jarang ditemu karena syiar Islam mulai menyadarkan kekeliruan masyarakat tentang kepercayaan tersebut.

Inilah gambaran sekilas tentang agama dan kepercayaan masyarakat Gorontalo.